

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemunculan pemimpin perempuan akhir-akhir ini banyak dikaji dalam ruang lingkup studi gender. Namun, kemunculan mereka membuat khalayak umum mempertanyakan independensi mereka dalam memenangkan kontestasi politik. Pasalnya, kemenangan mereka tidak terlepas dari politik dinasti, jejaring oligarki, hingga praktik klientelisme. Sedikit dari mereka yang mengandalkan modal-modal yang dimilikinya, kapabilitasnya dalam berpolitik, maupun isu-isu gender yang dibawanya. Seperti terpilihnya Nevi Zuairina sebagai anggota Parlemen perempuan yang notabene istri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno hingga terpilihnya Anna Sophana sebagai Bupati Indramayu yang menggantikan jabatan suaminya H. Irianto. Diantara banyaknya kajian terkait munculnya pemimpin perempuan, masih sedikit yang mengkaji bagaimana Kepala Desa Perempuan eksis mewarnai demokrasi inklusif Indonesia. Terlebih, belum ada yang secara serius mendalami modalitas yang digunakan oleh perempuan pesisir untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa. Maka, penelitian ini akan mengkaji kemenangan salah satu Kepala Desa perempuan di Kabupaten Jepara yang secara geografis terletak di daerah pesisir.

Kabupaten Jepara sendiri erat kaitannya dengan tradisi dan budaya Jawa. Masyarakat lokal disana dalam menjalankan rutinitasnya masih mengikuti ajaran-ajaran leluhur terdahulunya. Terlebih, dari 1.188.510 total keseluruhan penduduk Jepara terdapat sekitar 1.184.253 penduduk yang beragama Islam atau sekitar

99,6%. Mayoritas masyarakatnya yang beragama Islam menjadikan Kabupaten Jepara setiap tahunnya diwarnai oleh ritual-ritual adat yang berbasis agama Islam seperti pelaksanaan ritual perang obor, nyumpet, sedekah laut, buka-kuwur, ritual baratan, dan sebagainya yang dalam keberjalanannya dipandu oleh seorang laki-laki seperti kiyai, ustadz, hingga para pemangku kepentingan lain.

Akan tetapi, kearifan lokal tersebut justru menyimpan nilai-nilai patriarki yang kuat. Masyarakat yang masih kental dengan tradisi Jawa tentunya membuat konstruksi dan identitas perempuan menjadi tertindas. Seperti misalnya ketika ada ritual-ritual, perempuan bahkan tidak boleh memimpin jalannya ritual tersebut. Lantaran pada tatanan masyarakat tertentu, ritual-ritual tersebut identik dengan tokoh adat laki-laki, sedangkan perempuan bekerja dibalik layar untuk mempersiapkan ritual-ritual tersebut. Hal tersebut seringkali menyebabkan eksistensi perempuan tergerus oleh dinamika budaya etnik lokal. Padahal, seharusnya perempuan dalam kearifan lokal tidak bisa diabaikan begitu saja (Jajang, A. Rohmana, 2014: 151).

Meskipun demikian, masyarakat Jawa masih banyak yang beranggapan bahwa perempuan tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, entah itu pemimpin adat maupun pemimpin sebagai pemerintah yang memiliki kekuasaan. Jika didasarkan pada adat istiadat, laki-laki menjadi simbolik utama dari seorang pemimpin yang dianggap lebih gagah, tangguh, dan kompeten dalam memimpin masyarakat. Bahkan, dalam masyarakat Jawa ada paradoks perempuan adalah "*kanca ing wingking*" atau teman dibalik layar yang dalam kesehariannya bekerja di dapur untuk mewarnai lika-liku rumah tangga yang harmonis. Secara normatif,

hal tersebut terjadi lantaran perempuan Jawa tidak diperkenankan memiliki posisi yang lebih tinggi dari suaminya. Hal tersebut telah menunjukkan sempitnya ruang gerak bagi perempuan untuk berkarir di luar tugas-tugas domestiknya (Suhandjati & Sofwan, 2001: 6).

Terlebih, bagi masyarakat Jepara yang mayoritas beragama Islam, mereka memiliki keyakinan bahwa perempuan adalah seorang makmum yang pada hakikatnya harus mengikuti seluruh perintah suaminya. Banyak orang mengaitkan berbagai dalil untuk melarang perempuan menjadi pemimpin. Padahal, Islam sendiri mengajarkan perihal kesetaraan. Dalam hal ini, keduanya memiliki kesamaan derajat, tidak ada yang lebih mendominasi serta tidak ada yang merasa terdominasi. Namun, karena ajaran keagamaan mereka bersifat sinkretis sehingga mereka masih terpaku pada tradisi Jawa yang memandang perempuan kurang kompeten untuk menjadi seorang pemimpin.

Hal tersebut tercermin dalam dinamika politik lokal di Jepara yang kurang inklusif sehingga ruang partisipasi bagi perempuan menjadi terbatas. Di parlemen, keterwakilan perempuan yang berhasil menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2009 dan 2014 hanya berjumlah tiga orang.

Dalam parlemen, hanya tiga perempuan yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 dan 2014. Angka tersebut sangat kecil atau sekitar 6% dari keseluruhan anggota DPRD Jepara yang berjumlah 50 orang. Sedangkan, pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 terdapat tren peningkatan keterwakilan perempuan

dalam parlemen sebesar dua kali lipat daripada dua periode sebelumnya sebesar 12% atau sekitar 6 perempuan yang mengabdikan dirinya sebagai DPRD Jepara. Namun, peningkatan tersebut belum memenuhi kuota afirmasi 30%. Padahal, jika kita berpaku pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, pada setiap daerah pemilihan pengajuan calon anggota legislatif perempuan minimal 30%. Selain itu, sulitnya perempuan untuk berkontestasi pada panggung politik terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ironisnya, sejak 1950-2022, Jepara dinahkodai oleh laki-laki selama hampir 72 tahun dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam skala yang lebih kecil sekalipun, perempuan pun tetap sulit untuk mendulang suara pada pemilihan di tingkat desa. Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Jepara selama tiga periode terakhir (sejak 2007-2019), keterwakilan perempuan telah berjalan secara fluktuatif. Pada periode 2007-2013, dari jumlah keseluruhan 136 desa yang menggelar Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jepara, hanya lima perempuan yang berhasil memenangkan kontestasi atau sekitar 3,7%. Pada perkembangan selanjutnya, terjadi peningkatan kandidat perempuan terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Jepara periode 2013-2019, yakni sebesar 5% atau sekitar tujuh perempuan terpilih. Namun, peningkatan tersebut justru belum dapat dipertahankan pada Pilkades periode selanjutnya. Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 keterwakilan perempuan kembali turun dibandingkan periode sebelumnya dimana hanya terdapat empat perempuan terpilih atau sekitar 2,9%.

Tabel 1.1 Daftar Kepala Desa Perempuan di Kabupaten Jepara

No	Nama Kepala Desa	Desa yang Dipimpin	Periode Kepemimpinan
1.	Rukhayah	Desa Lebak	Periode 2007-2013
2.	Rofi'i	Desa Suwawal	Periode 2007-2013
3.	Hj. Sofrotul I	Desa Panggung	Periode 2007-2013
4.	Sri Wahyuni	Desa Kaligarang	Periode 2007-2013
5.	Siti Fatimah	Desa Jlegong	Periode 2007-2013
6.	Siti Fatimah	Desa Jlegong	Periode 2013-2019
7.	Hj. Sofrotul I	Desa Panggung	Periode 2013-2019
8.	Hj. Nurikhah	Desa Ngroto	Periode 2013-2019
9.	Tri Kunjayati	Desa Mayong Kidul	Periode 2013-2019
10.	Kusripah	Desa Mororejo	Periode 2013-2019
11.	Hening Indarti	Desa Demaan	Periode 2013-2019
12.	Ida Lestari	Desa Bulu	Periode 2013-2019
13.	Maz'roatul Khoir	Desa Kuwasen	Periode 2019-2025
14.	Mustafiyatun	Desa Kedungmalang	Periode 2019-2025
15.	Hj. Riyati	Desa Dermolo	Periode 2019-2025
16.	Khomsatun	Desa Kuanyar	Periode 2019-2025

(Sumber: BPS Kabupaten Jepara tahun 2007-2022)

Rendahnya keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak 2019 tidak terlepas dari fenomena persandingan 11 pasangan suami-istri bak pengantin baru pada panggung politik. Demokrasi semu tersebut menyebabkan rotasi jabatan hanya akan berpusat pada keluarga kandidat saja dimana tidak ada aspek rivalitas maupun partisipasi didalamnya. Sangat disayangkan ketika perempuan hanya dijadikan sandiwara politik saja dimana mereka diberi peran seolah-olah mereka benar-benar akan bertarung pada kontestasi. Padahal, keterwakilan mereka hanya sebatas digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan dimana suami mereka belum memiliki lawan hingga detik-detik terakhir penutupan. Hal tersebut terjadi lantaran jika didasarkan pada Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 bahwa calon tunggal dilarang melawan kotak kosong. Itu sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017

Pasal 47 C ayat (4) dan (5) dimana dalam Pemilihan Kepala Desa paling sedikit diikuti oleh dua calon, jika hanya satu calon maka pendaftaran akan diundur satu minggu. Selanjutnya jika tidak ada calon yang mendaftarkan lagi, maka BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa hingga waktu yang ditentukan oleh BPD.

Munculnya kompetitor ‘gadungan’ ini tidak lepas dari budaya patriarki yang kental di kalangan masyarakat (Puji Astuti, Dkk., 2019: 69). Ditengah-tengah Jepara yang Patriarki dan disamping kompleksitasnya sandiwara kompetitor ‘gadungan’, terdapat fenomena lain dimana ada empat perempuan yang berhasil menjadi Kepala Desa dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku dengan sah. Salah satu dari mereka adalah Mustafiyatun yang kini tengah memimpin Desa Kedungmalang. Pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 Ia mengalahkan lawannya F. Razikin yang merupakan seorang petahana yang telah memimpin Desa Kedungmalang selama satu periode dari tahun 2013-2019. Mustafiyatun bahkan mampu mendulang 1.545 suara, sedangkan F. Razikin memperoleh 1.242 suara. Dari tiga TPS yang ada, Mustafiyatun unggul dan menjadi calon dengan suara terbanyak di TPS 2 dan TPS 3 dengan masing-masing peroleh suara sebesar 523 dan 564. Untuk TPS 1 sendiri, F. Razikin lebih unggul dimana ia mendapatkan 507 suara dibandingkan Mustafiyatun yang hanya memperoleh 458 suara.

Terdapat selisih 303 suara dari hasil peroleh suara yang didapatkan oleh Mustafiyatun. Kita mengetahui bahwasannya sangat sulit untuk melawan calon petahana dimana F. Razikin telah memiliki modal sosial, politik, dan ekonomi yang kuat jika dibandingkan dengan Mustafiyatun. Pun, posisi Razikin lebih strategis untuk mendulang suara lebih besar dibandingkan lawannya Mustafiyatun. Razikin

sebagai petahana lebih awal membangun relasi dan jaringan politik ke berbagai pihak selama masa kepemimpinannya. Namun, pada realitanya Mustafiyatun sebagai kandidat baru dan seorang perempuan ternyata dapat mengalahkan lawannya F. Razikin.

Tentunya kemenangan Mustafiyatun tidak terlepas dari modalitas yang dimilikinya yang digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan elektabilitasnya. Pada konteks ini, sumberdaya yang Ia kelola dikonversikan menjadi modal yang berkontribusi pada keterpilihannya, baik jejaring yang lebih awal dibangunnya, besarnya dukungan dana yang diterima, kapabilitasnya dalam berpolitik, hingga karakter yang melekat pada dirinya yang membuat Ia memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian, penelitian kali ini menganalisis modalitas aa saja yang dimiliki oleh Mustafiyatun serta bagaimana modalitas tersebut digunakan untuk memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini meliputi:

1. Apa saja modalitas yang dimiliki oleh Mustafiyatun dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019?
2. Bagaimana penggunaan modalitas tersebut untuk memenangkan Pilkades Kedungmalang Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis modalitas yang digunakan oleh Mustafiyatun dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penggunaan modalitas tersebut untuk memenangkan Pilkades Kedungmalang Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait studi gender utamanya keterwakilan perempuan pada Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi beberapa pihak antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara, penelitian ini bisa menjadi sumber masukan bagi pembuat kebijakan agar dapat mendorong kader-kader perempuan potensial untuk maju dalam kontestasi politik.
- b. Bagi peneliti, dapat dijadikan dasar penelitian lanjutan yang berkenaan dengan objek studi kemenangan Kepala Desa Perempuan yang lebih komprehensif substansinya dan lebih luas cakupannya.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan semangat emansipasi bagi perempuan-perempuan untuk berkarir di bidang politik mengingat mereka telah diberikan kesempatan melalui kebijakan afirmasi.

1.5 Penelitian Terdahulu

Kiprah perempuan dalam mengambil peranannya dalam bidang politik telah berlangsung secara massif pasca Orde Baru yang mana telah banyak dikaji para peneliti terdahulu. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Qodarsasi dan Dewi (2019) yang berjudul Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, mereka melihat dengan adanya pilkada maka partisipasi masyarakat di bidang politik semakin luas. Untuk itu, kesempatan tersebut sudah seyogyanya disertai dengan pemberian pendidikan politik kepada masyarakat untuk menimbulkan pemahaman dan kesadaran masyarakat yang nantinya memiliki dampak positif guna mewujudkan kepemimpinan daerah yang akuntabel. Poin yang tidak kalah penting adalah kebebasan tersebut membuka peluang bagi para perempuan untuk mengambil peranannya di bidang politik.

Kemunculan perempuan sebagai pemimpin pada realitanya berjalan lambat lantaran dibutuhkan waktu yang lama bagi seorang perempuan untuk mempelajari bidang politik, utamanya untuk dapat maju memimpin daerahnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jaweng (2014) yang berjudul Infrastruktur Integritas dan Prestasi Perempuan Kepala Daerah: Perspektif Desentralisasi Politik bahwa perempuan membutuhkan durasi yang cukup panjang untuk menumbuhkan

kepercayaan diri, mendulang dukungan dari elite politik, hingga membangun kepercayaan masyarakat yang akan memilihnya.

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi kemunculan perempuan dalam politik. Faktor kekerabatan atau dinasti politik sejauh ini paling banyak menyokong keterwakilan perempuan yang hendak bertarung dalam medan Pilkada. Relevan dengan temuan Kusumaningtyas, Dkk. (2017) yang berjudul Resume Penelitian Perempuan Kepala Daerah Dalam Jejaring Oligarki Lokal bahwa perempuan kepala daerah umumnya dilahirkan dari faktor kekerabatan yang menjadi bagian dari oligarki lokal. Konsekuensinya, mereka menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam menjaga kemandirian/independensinya terhadap para oligark. Hal tersebut menimbulkan adanya pelemahan kinerja kepala daerah perempuan dalam mendorong demokrasi lokal maupun kepentingan serta kebutuhan praktis gender di daerah yang dipimpinnya. Relevan dengan penelitian tersebut, Apriani, F. (2019) dalam penelitiannya dengan judul Faktor Familial Ties Bagi Perempuan Pemimpin Dalam Tata Pemerintahan Daerah didapatkan bahwa kekerabatan menjadi aspek munculnya pemimpin perempuan di Indonesia yang perempuan mana sebagian besar menduduki jabatan sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah.

Penelitian dengan hasil yang sama dilakukan oleh Machmud, H. (2019) dengan judul Perempuan dan Politik Lokal (Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Tenggara) bahwa perempuan diusung oleh partai karena faktor kekerabatan dan kemampuan modal yang dimilikinya; tidak didasarkan pada

kualitas, kapabilitas, maupun kompetensi dari proses penjangkaran yang adil, inklusif, dan terbuka.

Sedangkan, dalam penelitian Malik, S. (2021) yang berjudul *Perempuan dalam Pusaran Politik Lokal (Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah)*, dihasilkan bahwa faktor pendorong partisipasi perempuan dalam Pilkada tidak lain karena adanya kebijakan yang membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam arus politik pemerintahan serta aksesibilitas nilai lokal yang menghargai posisi perempuan sama dengan laki-laki.

Selain faktor diatas, kemunculan perempuan juga difasilitasi oleh modalitas yang mereka miliki, baik modal politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam penelitian yang dikaji oleh Dewi, K.H dan Ahmad, H. F (2016) yang berjudul *Konteks Sosial Ekonomi Kemunculan Perempuan Kepala Daerah* ditemukan bahwa pemimpin perempuan dapat muncul dalam kondisi sosial-ekonomi apapun. Maka dalam hal ini, perempuan di daerah manapun tidak peduli dalam kondisi masyarakat dengan IPM rendah ataupun tinggi maupun dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah atau tinggi tetap dapat eksis untuk bertarung dalam arena politik. Pada konteks ini, ketika perempuan dapat mengelola sumberdaya yang dia miliki, bahkan sekecil apapun itu jika dikelola dengan baik maka akan tetap berkontribusi pada kemenangannya. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Firmansyah dan Faradhila (2022) dengan judul *Modal Politik Kandidat Perempuan dalam Pemilihan Umum* bahwa ketika perempuan dapat menggunakan strategi yang benar dan tim sukses yang solid, maka kekurangan pada modalitas ekonomi pun dapat diatasi dengan baik. Adapun modalitas yang seringkali menjadi faktor utama keterpilihan

perempuan adalah berkenaan dengan modal politik. Arfa dan Miswanto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Partisipasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam menemukan bahwa tingginya partisipasi perempuan disebabkan oleh dukungan dari elite politik.

Keterwakilan perempuan dalam bidang politik tidak terlepas dari peran strategisnya dalam mengangkat isu-isu gender. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Wijaksana, M. B. (2013) melihat bagaimana pentingnya peran perempuan dalam politik mengingat perempuan memiliki berbagai kebutuhan khusus yang tidak bisa dipahami oleh laki-laki, melainkan hanya perempuan itu sendiri, terutama masalah pada kesehatan reproduksi yang mencakup akses terhadap informasi kesehatan reproduksi dan pelayanan kesehatan reproduksi. Selain itu, organ reproduksi perempuan tentunya berbeda dengan laki-laki sehingga mereka dapat mengalami menstruasi, hamil dan melahirkan. Namun, peran perempuan dalam politik masih sebatas menjadi 'narasi simbolik perempuan' saja dan belum merepresentasikan kepentingan gender. Relevan dengan temuan tersebut, hasil dari penelitian Kusumaningtyas, Dkk. (2017) bahwa 'narasi simbolik perempuan' tetap perlu diberikan apresiasi mengingat mereka merupakan harapan baru yang dapat mendorong motivasi dan inspirasi bagi perempuan lainnya untuk berkiprah di bidang politik-pemerintahan. Mereka perlu mendapatkan dorongan secara berkelanjutan agar eksistensinya sebagai pemimpin sampai pada tahap 'narasi substantif perempuan'.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji perempuan dalam politik memiliki persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang dikaji kali ini, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jaweng (2014); Arfa dan Miswanto (2018); Apriani, F. (2019); Machmud, H. (2019); Malik, S. (2021) memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas terkait pemimpin perempuan. Adapun, objek penelitian terdahulu tersebut menekankan pada Kepala Daerah perempuan dengan fokus penelitian terbatas pada latar belakang kemunculan pemimpin perempuan. Sedangkan, objek dari penelitian ini adalah Kepala Desa (Kades) perempuan dengan fokus penelitiannya berupa modalitas yang digunakan oleh calon Kades perempuan dalam memenangkan kontestasi politik.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi, K. H. dan Ahmad, H. F (2016); Qodarsasi dan Dewi (2019); Firmansyah dan Faradhila (2022) memiliki topik dan fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama mengangkat topik terkait politik gender dengan fokus penelitian yang terbatas pada modalitas yang digunakan oleh calon perempuan dalam memenangkan Pilkada. Adapun, objeknya berbeda dimana objek pada penelitian terdahulu adalah Kepala Daerah Perempuan, sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah Kepala Desa Perempuan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Wijaksana, M. B. (2013); dan Kusumaningtyas, Dkk. (2017) memiliki topik yang sama dengan penelitian ini, yakni sama-sama mengangkat terkait politik gender. Sedangkan, objek dari penelitian terdahulu

adalah Kepala Daerah perempuan dengan fokus penelitiannya yang terbatas pada peran pemimpin daerah perempuan. Adapun, objek dari penelitian ini adalah Kepala Desa perempuan dengan fokus penelitian modalitas yang digunakannya dalam memenangkan kontestasi politik.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Modalitas dalam Kontestasi Politik

Pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan ketika mereka bertarung dalam panggung politik, maka keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk sama-sama menjadi kandidat terpilih dengan perolehan suara banyak. Namun, kesempatan tersebut tentunya tidak muncul begitu saja melainkan lahir dari modalitas yang kuat. Maka menjadi penting bagi calon untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sebagai modalitas dalam bertarung di panggung politik lokal maupun nasional, baik pada Pemilu, Pilkada, maupun Pilkadaes. Doe, Dkk. (2020) berpendapat bahwa pertarungan di panggung politik sangat mengedepankan modalitas karena modal memberikan banyak sumbangsih bagi kemenangan seorang kandidat. Pada konteks ini, semakin kuat modal yang dimiliki maka semakin terbuka peluang bagi kandidat untuk memenangkan kontestasi. Keterpilihan kandidat dalam kontestasi merupakan hasil dari proses yang rumit sehingga tidak dapat dikatakan hasil dari salah satu faktor atau modalitas tertentu saja (Richard, 2010). Artinya, modalitas sebagai penentu kemenangan tidak dihasilkan dari satu faktor saja melainkan akumulasi dari berbagai modal, baik modalitas politik, modalitas ekonomi maupun modalitas sosial.

Pierre Bourdieu (1986) dalam bukunya yang berjudul *The Forms of Capital*, berpendapat bahwa modal berhubungan erat dengan perebutan kekuasaan. Bourdieu menggunakan konsep kekuasaan sebagai titik awal untuk membangun teori modalitas dengan mempertanyakan dominasi di kalangan masyarakat politik. Dalam hal ini, kekuasaan dapat dicapai ketika seseorang memiliki sumberdaya yang disebut sebagai modal. Ciri dari modal menurut Bourdieu (1995) sebagaimana yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Outline Of A Theory of Practice*, modal diperoleh dari akumulasi investasi, didapatkan melalui pemberian orang lain seperti warisan (uang, kecerdasan, dll), serta memberikan manfaat/keuntungan yang sesuai dengan kesempatan yang dimiliki.

Bourdieu (1986) menggambarkan modalitas sebagai sesuatu yang bernilai simbolis dan memiliki karakteristik yang tidak dapat diukur tetapi memiliki makna penting secara kultural seperti kehormatan, status sosial, kekuasaan, serta modal budaya. Bourdieu dalam Anwartina (2013: 2) membagi modal menjadi empat jenis, yakni modal ekonomi, budaya, sosial, dan simbolik. Bagi Bourdieu, modalitas tersebut dapat diakumulasi dan dijadikan sebagai basis dominasi yang dapat dipertukarkan. Pertukaran salah satu bentuk modal dengan modal lainnya yang paling dramatis adalah modalitas simbolis. Pada konteks ini, modalitas simbolik biasanya dalam bentuk kehormatan atau nama baik keluarga yang dapat dikonversi menjadi modalitas ekonomi, seperti pertukaran pemberian dalam pesta, upacara, pernikahan yang bertujuan untuk mengubah hubungan berkepentingan menjadi hubungan timbal-balik. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam hukum pertukaran yang lazim pada perekonomian

kuno adalah semakin dekat relasi resprositanya antara seseorang atau kelompok dengan yang lain, maka semakin mudah untuk melakukan suatu transaksi. Bentuk tersebut diakui secara sah dalam bentuk-bentuk pertukaran modal yang diperkenalkan (Richard, Dkk., 2009). Namun, dalam situasi tertentu modalitas budaya dapat diubah menjadi modal ekonomi seperti kualifikasi pendidikan seseorang. Sama halnya dengan modalitas sosial yang dapat dikonversikan menjadi bentuk modal ekonomi dalam bentuk pencapaian akademik seperti gelar sarjana (Syahra, 2003:3).

Bentuk-bentuk modalitas dalam teori yang dikemukakan oleh Bourdieu tahun 1986 telah membantu para aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan di panggung politik, baik nasional maupun lokal melalui pemanfaatan sumberdaya yang mereka miliki. Pelbagai modal tersebut dikerahkan agar kandidat dapat tampil maksimal di panggung politik guna mempengaruhi persepsi dan pilihan masyarakat. Adapun penjelasan dari bentuk-bentuk modalitas menurut Bourdieu (1986) dalam memperoleh kekuasaan politik dapat dilihat secara lebih komprehensif dijabarkan di bawah ini:

1. Modalitas Ekonomi

Modal ekonomi berkaitan dengan pengeluaran biaya-biaya yang digunakan baik sebelum, selama, hingga setelah perhelatan politik digelar. Dalam hal ini, tidak ada Pemilihan Kepala Desa yang benar-benar tanpa uang. Menurut Bourdieu (1986), modal ekonomi dapat diubah dengan mudah ke dalam bentuk uang dan dapat dilembagakan menjadi kepemilikan. Pun, modal ekonomi menjadi basis utama dari berbagai jenis modal lainnya (Bourdieu, 1986: 252). Pada nantinya, modal ekonomi

akan digunakan untuk membiayai semua tahapan-tahapan yang begitu kompleks sebelum pemilihan, baik yang bersumber dari uang pribadi maupun dari donatur.

Bahkan, jauh sebelum calon kandidat maju ia membutuhkan serangkaian sosialisasi untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat bahwa ia akan maju dalam pencalonan. Beberapa bulan sebelum kampanye, Ia akan membuka tamu atau *open house* kepada siapapun sehingga membutuhkan biaya yang besar karena harus menjamu dengan baik. Menurut Sahdan dan Haboddin, ada tiga faktor yang menyebabkan mahalannya ongkos politik, yakni:

1. Dukungan partai politik sangat penting bagi calon. Terlebih jika rekam jejak dari partai yang akan mengusungnya baik, maka calon tersebut tentunya akan membutuhkan parpol tersebut untuk dijadikannya sebagai kendaraan politik. Dalam hal ini, parpol ketika mengusung calon membutuhkan dana sumbangan dari calon yang nominalnya sangat besar.
2. Keperluan-keperluan yang harus disiapkan saat kampanye membutuhkan biaya yang besar seperti pembuatan poster, kaos, pemasangan iklan, dan sebagainya.
3. Untuk mendulang suara yang banyak, maka calon seringkali melakukan praktik jual beli suara agar masyarakat mau memilihnya.

2. Modalitas Budaya

Menurut Bourdieu (1986), modalitas ekonomi dapat dikonversi menjadi modal budaya dalam bentuk pendidikan. Dalam hal ini, kualifikasi intelektual yang komprehensif terkait politik dapat dijadikan modal bagi kandidat untuk bertarung di panggung politik. Kecakapan dalam berpolitik tersebut tentunya dicapai melalui

pendidikan formal yang ditempuh maupun transfer ilmu atau warisan dari keluarga (Fashri, 2014). Akan tetapi, hal yang paling mengikat dari modalitas budaya adalah sistem-sistem nilai, tradisi, dan adat yang berkembang di masyarakat.

3. Modalitas Sosial

Bourdieu (1986) dalam Mbolang (2020:186) menggambarkan modal sosial sebagai akumulasi dari berbagai sumberdaya yang ada, baik aktual maupun potensial yang berkaitan dengan jejaring yang tetap didasarkan pada rasa saling mengenal dan mengakui. Dalam hal ini, modalitas sosial berhubungan dengan figur kandidat yang dapat memantik dan memunculkan rasa kepercayaan dari masyarakat serta menciptakan suatu relasi sosial dan jejaring yang akan mendukungnya. Interaksi sosial dengan berbagai tokoh kemasyarakatan maupun dengan masyarakat setempat itu sendiri menjadi basis yang sulit untuk diabaikan kandidat. Pembangunan relasi sosial dengan berbagai kunjungan informal dapat memperkuat basis kandidat di massa akar rumput. Massa akan mempercayai kandidat untuk merepresentasikan kepentingan mereka. Sejumlah aspek tersebut semestinya perlu dimiliki oleh setiap kandidat guna memobilisasi dukungan dari masyarakat.

Modal sosial pada dasarnya merupakan karakter yang melekat pada diri seseorang secara personal. Bahkan, kandidat telah membentuk dan membangun citra baik sedemikian rupa di depan masyarakat yang telah berlangsung sejak lama. Adapun, modal sosial terbesar berkaitan dengan kepercayaan dimana pada nantinya profilnya dapat diterima oleh masyarakat setempat. Lin (2004) berpendapat bahwa modal sosial menekankan pada hubungan sosial berupa akses maupun sumber daya yang melekat pada jaringan sosial tersebut. Modal sosial merupakan *mutual trust*

antara masyarakat dengan pemimpinnya (Robert Putnam, 1993). Sejalan dengan Putnam, Francis Fukuyama berpendapat bahwa unsur penting yang perlu dimiliki oleh seorang kandidat adalah kepercayaan. Pada konteks ini, semakin tinggi kepercayaan di kalangan masyarakat, maka semakin berpeluang seseorang untuk dipilih oleh masyarakat karena dianggap dapat sukses menjalankan visi dan misinya. Maka, modal sosial dapat dikatakan sebagai penentu akhir kesuksesan sebuah kompetisi (Burt, 1995: 8).

4. Modalitas Simbolik

Modal simbolik merupakan salah satu bentuk modal yang dapat dikelola agar optimal dalam merebut kekuasaan simbolik sebagai pengakuan oleh suatu kelompok, baik institusional maupun noninstitusional (Imam dan Purwaningsih, 2022:143). Modal simbolik memiliki peran dalam memapankan relasi kekuasaan simbolik dalam struktur masyarakat. Kekuasaan simbolik acapkali membutuhkan status, popularitas, jabatan, mobil mewah, gelar, kehormatan, prestise, dll.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Dalam penelitian ini, untuk menganalisis modalitas Mustafiyatun dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019 menggunakan teori modalitas oleh Bourdieu (1986) sebagai berikut:

1. Modal Ekonomi

Tidak ada pemilihan yang diselenggarakan tanpa uang. Modal ekonomi dapat diubah dengan mudah ke dalam bentuk uang dan dapat dilembagakan menjadi kepemilikan. Pun, modal ekonomi menjadi basis utama dari berbagai jenis modal

lainnya (Bourdieu, 1986: 252). Dalam hal ini, modalitas ekonomi dapat dilembagakan menjadi lumbung suara melalui pengenalan kandidaat saat kampanye hingga *open house* untuk menjamu masyarakat yang akan menjadi calon pemilih.

2. Modal Budaya

Modalitas budaya berkenaan dengan system nilai, adat, dan budaya masyarakat itu sendiri yang akan melahirkan suatu penolakan/penerimaan dari masyarakat akan eksistensi pemimpin perempuan.

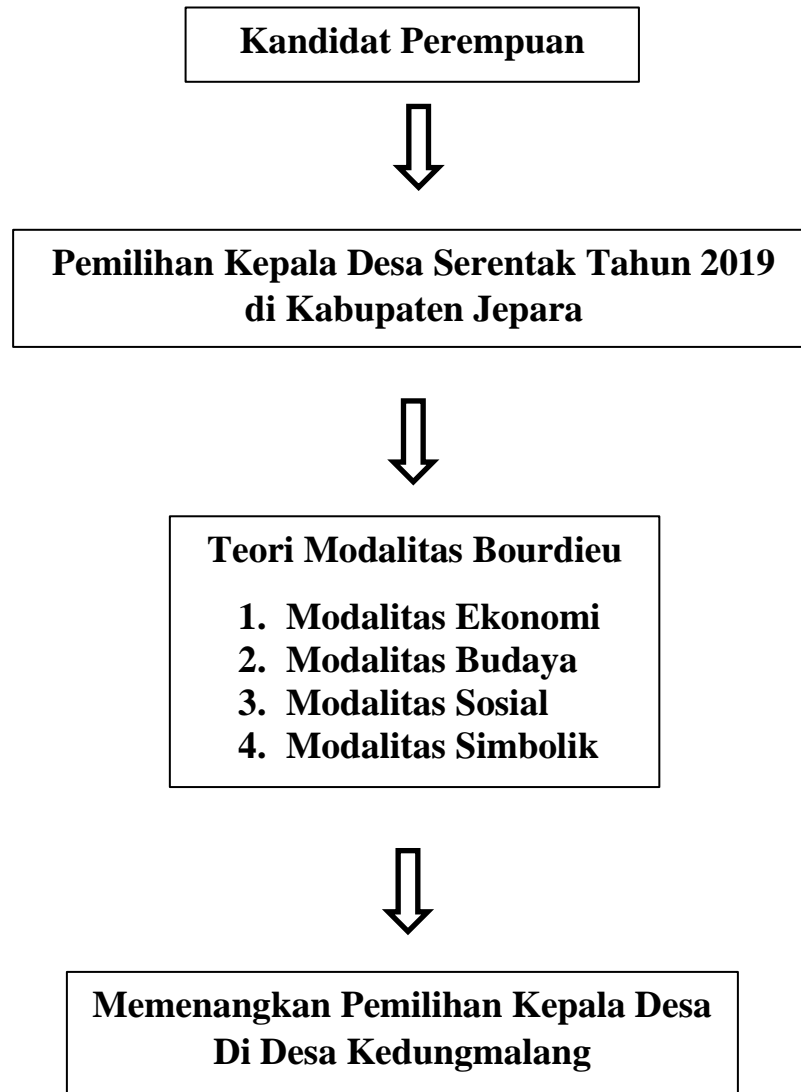
3. Modal Sosial

Bourdieu (1986) dalam Mbolang (2020:186) menggambarkan modal sosial sebagai akumulasi dari berbagai sumberdaya yang ada, baik aktual maupun potensial yang berkaitan dengan jejaring yang tetap didasarkan pada rasa saling mengenal dan mengakui. Dalam hal ini, modalitas sosial berhubungan dengan figur kandidat yang dapat memantik dan memunculkan rasa kepercayaan dari masyarakat serta menciptakan suatu relasi sosial dan jejaring yang akan mendukungnya.

4. Modal Simbolik

Modal simbolik dapat terakumulasi dari status, popularitas, jabatan, mobil mewah, gelar, kehormatan, prestise, dll yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan simbolik.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Argumen Penelitian

Kemenangan Mustafiyatun dalam Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019 tidak terlepas dari modalitas yang digunakannya, baik karena kepiawaiannya dalam berpolitik, keunggulan personal yang dimilikinya, jaringan politik yang kuat, hingga kekuatan finansial yang menjadi strategi pemenangannya.

1.10 Metode Penelitian

1.10.1 Desain Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji modalitas yang digunakan oleh Mustafiyatun dalam Pilkadaes 2019. Umumnya, pendekatan kualitatif cenderung memahami suatu konstruksi yang berhubungan dengan aktivitas manusia sehari-hari. Proses penelitian kualitatif berkembang menyesuaikan situasi untuk merepons fakta-fakta yang dijumpai di lapangan (LeCompte & Schensul, 1999). Penelitian kualitatif sangat terbatas pada situasi tertentu sehingga tidak bisa digeneralisasi di dalam segala situasi melainkan digunakan untuk membangun makna pada suatu gejala sosial.

Creswell (2007: 28) berpendapat bahwa penelitian kualitatif berusaha membangun makna terhadap suatu peristiwa/fenomena berdasarkan pandangan partisipan. Selaras dengan pendapat Creswell, Mulyadi (2011: 132) mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif menonjolkan pemaknaan serta pemahaman dari dalam, penalaran, definisi kondisi tertentu serta lebih mengkaji berbagai hal yang memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Di samping itu, pada penelitian kualitatif seorang peneliti akan memanfaatkan dirinya sebagai instrumen penelitian. Lincoln dan Guba (1985: 52) berpendapat ketika pendekatan kualitatif instrumennya bukan manusia, maka akan sulit untuk menangkap berbagai realitas dari fenomena yang terjadi. Untuk itu, peneliti perlu mempunyai bekal teori dan pengetahuan yang memadai dengan mengerahkan fungsi inderawinya untuk menjabarkan dan mengkonstruksikan kondisi sosial yang diteliti menjadi lebih komprehensif dan bermakna.

Adapun pertimbangan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena kajian terkait Kepala Desa Perempuan bersifat alamiah. Dalam hal ini, peneliti bersinggungan langsung dengan subjek kajian sehingga didapatkan data mendalam yang telah tervalidasi dan sesuai dengan fakta di lapangan. Guna memperkuat data maupun informasi yang ada, peneliti perlu memiliki pemahaman mendalam terkait fokus penelitian yang diangkat dengan menggunakan studi kasus. Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati (2016) berpendapat bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dalam hal ini, proses pengumpulan dan analisis data bersifat kasus pula. Maka dari itu, kajian terkait modalitas Kepala Desa perempuan dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Kabupaten Jepara lebih cocok menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

1.10.2 Lokasi Penelitian

Penelitian yang berfokus pada modalitas yang digunakan oleh kandidat Kepala Desa perempuan dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 berlokasi di Desa Kedungmalang, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

1.10.3 Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi. Namun, Spradley menggunakan situasi sosial dalam penelitian kualitatif yang terdiri atas tiga elemen, yakni tempat, aktor dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Dalam proses pengambilan subjek, penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik purposive sampling. Alasan penggunaan teknik purposive sampling tidak lain karena teknik ini tidak digunakan untuk membuat suatu generalisasi. Purposive sampling menurut Sugiyono (2017: 219) merupakan teknik dalam pengambilan sampel yang

didasarkan atas pertimbangan bahwa sampel yang diambil adalah orang yang dianggap paling tahu terkait apa yang kita teliti guna memudahkan peneliti untuk menyelami objek kajian. Sementara purposive sampling menurut Arikunto (2006) merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas pertimbangan yang berfokus pada suatu tujuan tertentu, bukan atas pertimbangan random, daerah, maupun strata.

Jadi, metode purposive sampling lebih berfokus pada karakteristik sampel tertentu yang dianggap mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Pada dasarnya, dalam metode sampling ini tidak terdapat ketentuan baku terkait sampel dan cara menentukan sampel, didasarkan pada berbagai pertimbangan dari peneliti sampai data yang didapatkan jenuh. Sampel yang digunakan juga relatif sedikit karena metode purposive sampling tidak digunakan untuk mengeneralisasi melainkan berfokus pada karakteristik responden selama dapat menjawab pertanyaan yang diajukan.

Selain itu, teknik pengambilan subjek penelitian juga dilakukan menggunakan snowball sampling. Snowball sampling digunakan untuk mencari key-informan untuk menunjuk sampel lain yang dimungkinkan mengetahui informasi terkait strategi yang digunakan oleh Mustafiyatun dalam memenangkan Pilkades.

Berdasarkan berbagai pertimbangan serta indikator yang ada, peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan mewawancarai 7 narasumber, yakni Mustafiyatun selaku Kepala Desa Perempuan di Desa Kedungmalang; Toleb

dan Surya selaku tim pemenang; serta 4 masyarakat Desa Kedungmalang yang meliputi Zunaefa, Jumiati, Sodikin, dan Subkhan.

1.10.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang disajikan pada penelitian kualitatif berbentuk naratif atau deskriptif yang mana kebenarannya tidak bisa diukur sehingga peneliti harus menggali data sedalam-dalamnya. Menurut Moleong (2005: 4), data-data hasil penelitian kualitatif bukan berbentuk angka, melainkan kata-kata, frasa, maupun gambar. Data tersebut dikumpulkan melalui proses wawancara, catatan lapangan, studi dokumentasi, maupun dokumen lainnya. Terdapat dua sumber data pada penelitian ini, yakni data primer maupun data sekunder. Data primer merupakan data yang dapat diperoleh secara langsung di lapangan. Sementara, data sekunder tidak langsung didapatkan dari sumbernya seperti studi dokumentasi. Keduanya digunakan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yang dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Wawancara

Kita mengetahui bahwasannya tujuan dari penelitian kualitatif tidak lain untuk memperoleh pemahaman serta deskripsi secara mendalam terkait fenomena-fenomena sosial. Untuk itu, peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk memperoleh informasi secara langsung dari beberapa narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur guna mengetahui berbagai sudut pandang dari narasumber untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai modalitas yang digunakan oleh Mustafiyatun

dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa Kedungmalang tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

2. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk melengkapi data dari proses wawancara. Studi dokumentasi merupakan kegiatan dalam mengumpulkan sumber-sumber tertulis yang dilanjutkan dengan aktivitas membaca, mencatat, mempelajari hingga mengolah sumber referensi tersebut untuk mendapatkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam prosesnya, peneliti melakukan penelusuran dari berbagai buku, jurnal penelitian terdahulu, literatur, catatan, laporan, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian yakni terkait studi gender.

3. Studi Pustaka

Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui buku, jurnal, website, hingga dokumen penting yang berhubungan dengan penelitian ini. Studi pustaka membantu peneliti untuk menemukan kebaruan dari penelitian, analisis data sebelum turun lapangan, hingga mencocokkan teori yang digunakan dengan rumusan masalah yang diajukan.

1.10.6 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data yang digunakan meliputi beberapa tahapan:

1. Analisis data sebelum di lapangan

Sebelum peneliti terjun ke lapangan, peneliti melakukan analisis melalui studi dokumentasi pada data-data hasil studi terdahulu maupun data sekunder lainnya yang digunakan sebagai dasar acuan sesuai dengan fokus penelitian.

2. Analisis data di lapangan

Setelah semua data terkumpul dari hasil wawancara dan studi dokumentasi, maka tahapan berikutnya adalah analisis data yang digunakan untuk menyusun data secara sistematis dan komprehensif. Adapun langkah-langkah analisis data dilapangan dapat dilihat berikut ini:

- a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dalam menyederhanakan, menggolongkan, dan membuang data yang tidak perlu agar dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami oleh pembaca. Data-data yang diperoleh dari proses wawancara perlu direduksi untuk melihat relevansi data dengan tujuan akhir penelitian. Peneliti melakukan pereduksian data dengan meringkas, memilih hal-hal penting dan pokok, serta memfokuskan pada apa yang sedang dicari.

- b. Penyajian Data

Pasca tahap pereduksian data, maka tahap selanjutnya yang harus dilakukan peneliti adalah tahap penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk menyusun data secara sistematis sehingga dapat memberikan kesimpulan yang mudah dipahami pembaca. Data pada penelitian ini disajikan dalam bentuk teks naratif atau catatan lapangan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan terakhir dari teknik analisis data pada penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan digunakan untuk menegaskan ulang hasil temuan yang diverifikasi untuk melihat apakah ada kesesuaian antara data dengan konsep dasar yang dijadikan landasan.

1.10.7 Kualitas Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mencari data valid. Dalam hal ini, hasil penelitian yang didapat merupakan kondisi atau fakta yang terjadi di lapangan. Untuk itu, data yang telah terkumpul harus dilakukan uji kualitas dan validitas sehingga data yang dihasilkan tidak invalid. Untuk melakukan uji validitas, peneliti menggunakan teknis triangulasi sebagai teknik pemeriksaan atau pengecekan data dari sumber-sumber yang ada dengan beberapa cara dan diwaktu tertentu. Dalam penelitian ini, digunakan teknik triangulasi sumber untuk melakukan komparasi hasil wawancara antara satu narasumber dengan narasumber lainnya hingga membandingkan hasil wawancara dengan dokumen relevan yang ada. Hal tersebut bertujuan untuk menguji validitas data sehingga data yang dihasilkan tidak bersifat subjektif.